



7.510 Buruh Kena PHK dan Dirumahkan

■ Baru 227 Perusahaan Melaporkan Pekerja Terdampak Covid-19

YOGYA, TRIBUN - Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta masih melakukan pendataan terhadap karyawan perusahaan yang mendapat pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan. Hanya saja, hingga 28 April 2020 ini baru sekitar 227 dari 1.600an perusahaan yang melaporkan karyawan dirumahkan dan diPHK.

Kepala Bidang (Kabid) Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Diskop UKM Nakertrans Kota Yogyakarta, Emy Indrayati, mengatakan, berdasarkan data yang dimilikinya dari 227 perusahaan yang melaporkan, sebanyak 7.510 karyawan kena PHK dan dirumahkan.

Dari 7.510 karyawan yang di PHK dan dirumahkan tersebut, ada 1.488 karyawan asal Kota Yogyakarta. Sebanyak 1.426 karyawan dirumahkan, sedangkan 62 lainnya kena PHK. Dia menyebut ada sekitar 1.600an perusahaan yang seharusnya melapor menurut data triwulan empat 2019.

"Kami masih berproses (pendataan), bagi karyawan terdampak Covid-19. Data ini dinamis sekali. Jadi angka bisa berubah-ubah," katanya, Rabu (29/4).

Sedangkan jika dilihat dari kategori perusahaan, perhotelan merupakan perusahaan yang paling banyak terdampak, yaitu sebanyak 101 perusahaan. Selain ho-

tel, kategori yang terdampak lain adalah perdagangan, mencapai 46 perusahaan, disusul kategori jasa sebanyak 30 perusahaan, dan restoran sebanyak 22 perusahaan.

"Sektor yang paling terdampak saat ini memang perhotelan. Kalau saat ini sementara masih mengumpulkan data pekerja yang terdampak dulu. Kami minta agar perusahaan segera melaporkan," terangnya.

"Kami sarankan untuk mendaftar kartu pra kerja. Kami juga tawarkan ke perusahaan untuk melakukan pendampingan kartu pra kerja Tetapi kita lakukan jarak jauh," sambungnya.

Dikonfirmasi secara terpisah, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota Yogyakarta, Tri Agus Haryadi menambahkan rata-rata karyawan yang dirumahkan hanya mendapat separuh gaji.

"Rata-rata digaji separuh, tambahny singkat,

Separuh gaji

Ketua SBSI DIY, Dani Eko Wiyono sebelumnya juga mendesak supaya Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) dan Dinas Sosial (Dinsos) DIY memperhatikan buruh yang terdampak Covid-19.

Mereka meminta supaya para buruh yang terdampak Covid-19 di DIY juga diusulkan menerima stimulus bantuan sosial. Stimulus berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) maupun Program Keluarga Harapan (PKH) menurut Dani sangat dibutuhkan oleh para buruh.

"Karena saat ini mereka kesulitan untuk mencukupi kebutuhan. Saya berharap fokus Pemda DIY bukan hanya kepada masyarakat yang menerima PKH, BLT, dan BPNT. Para buruh ini juga harus diperhatikan," tegasnya. (**maw/hda**)

3.
 4.

Untuk Diketahui
 Netral Biasa Jumpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Maret 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005